

Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh di RT 08 Kawasan Permukiman Bantaran Sungai Jangkok

Salma Etqia Hanina^{(1)*}, Rizkika Haida Ramdani⁽¹⁾, Mira Yundarisman⁽¹⁾, Baiq Thahira Alfa Tsani⁽¹⁾, Lalu Muhammad Gantara Ranusman⁽¹⁾, Pascaghana Jayatri Putra⁽¹⁾
*etqias@gmail.com

⁽¹⁾Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Abstrak

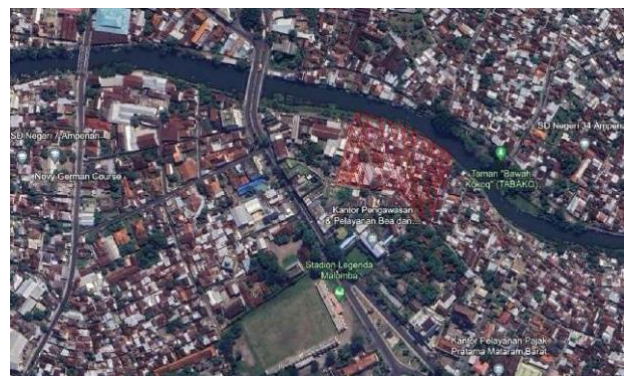
Kota merupakan suatu wilayah yang dijadikan pusat berbagai macam kegiatan manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan kepadatan jumlah penduduk sehingga, muncul permukiman informal yang kemudian berkembang menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang berada di RT 08 kawasan Bantaran Sungai Jangkok contohnya, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, survei, dan pengumpulan data berdasarkan indikator kumuh pada PUPR No. 14/PRT/M/2018. Kriteria tersebut antara lain, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, serta proteksi kebakaran. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa permukiman kelurahan Banjar RT 08 yang berada di bantaran sungai Jangkok belum memenuhi beberapa indikator yakni aspek bangunan gedung, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawasan ini termasuk kategori kumuh sedang.

Kata-kunci : karakteristik permukiman kumuh, permukiman kumuh, tingkat kekumuhan

Pendahuluan

Kota merupakan suatu wilayah yang dijadikan pusat berbagai macam kegiatan manusia baik dari masyarakat pedesaan maupun masyarakat dari perkotaan itu sendiri. Akibatnya, masalah umum yang kerap muncul di kawasan perkotaan adalah kepadatan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh tingginya laju urbanisasi yang terjadi. Kepadatan jumlah penduduk yang tinggi tentu saja dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat seperti kemiskinan, terbatasnya lahan tempat tinggal, dan minimnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, muncul area informal di sekitar pusat kota yang lambat laun berkembang menjadi kawasan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permukiman) Permukiman kumuh merupakan fenomena yang kerap terjadi di kawasan perkotaan. Munculnya kawasan permukiman kumuh ini menjadi penyebab terjadinya kurangnya kesejahteraan, jumlah penduduk yang melampaui kapasitas tinggal, dan ketidakmampuan sarana prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Agistya, et.al, 2021). Permukiman kumuh pada wilayah perkotaan kerap kali bertempat pada area yang dekat maupun jauh dari pusat kota (Sukmaniar, et.al. 2020).



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Permukiman yang terletak di kawasan Bantaran Sungai Jangkok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat salah satunya. Berlokasi di kelurahan Banjar yang berada di seberang selatan Sungai Jangkok. Sungai jangkok merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di Kota Mataram. Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok berhulu dari Gunung Punikan dan mengalir ke barat serta berhilir di Kota Mataram dengan panjang 47,106 km dan luas 170,298 km². Area Hilir Bantaran Sungai Jangkok yang terletak di Kecamatan Ampenan merupakan area yang paling banyak dipadati oleh pemukiman penduduk serta beberapa fasilitas publik. (A Rahadiati, et.al. 2021). Adapun, Kawasan DAS Jangkok memiliki luas Kawasan Kumuh berkisar 73.21 hektar atau 24.12 %. Jumlah tersebut merupakan kawasan strategis yang ada di kota Mataram berdasar tinjauan dari segi fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan kepentingan pertumbuhan Ekonomi. (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram. 2019)

Padatnya kawasan permukiman di bantaran Sungai Jangkok disebabkan oleh beberapa faktor atau permasalahan utama antara lain; status kepemilikan bangunan, minimnya persediaan lahan untuk untuk

persediaan sanitasi yang baik, taraf hidup yang rendah, rawan bencana dan penyakit. Eksistensi kawasan permukiman kumuh ini juga menyebabkan timbulnya kesenjangan antara kawasan permukiman kumuh tersebut dengan kawasan permukiman lainnya yang letaknya berdekatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirasa penting untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh pada kawasan Sungai Jangkok yang ditinjau dari beberapa indikator yang mengacu pada kriteria menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018. Kriteria tersebut antara lain; bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tingkat kekumuhan Permukiman Bantaran Sungai Jangkok dilakukan dengan observasi dan survei dengan mengacu pada kriteria-kriteria indikator permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik Indonesia nomor 14/PRT/2018 ayat (1) mengenai pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yakni antara lain:

A. Bangunan Gedung

Standar kekumuhan dilihat dari bangunan gedung meliputi beberapa aspek yakni;

a. Ketidakteraturan Bangunan

- 1) Tidak sesuai atau melengkapi ketentuan tata bangunan dalam RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan), sekurang-kurangnya pengaturan mengenai bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu titik atau zona.
- 2) Tidak melengkapi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas yang terdapat pada RTBL (Rencana Tata Bangunan Lingkungan), sekurang-kurangnya pengaturan mengenai blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian serta elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan muka jalan.

b. Tingkat Kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau:

- 1) Mengenai KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang melampaui RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), dan/ atau RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)
- 2) Mengenai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang melampaui ketentuan yang terdapat pada RDTR, dan/ atau RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

c. Kualitas bangunan yang tidak melengkapi syarat, ialah keadaan bangunan gedung yang terdapat dalam suatu perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung tersebut yakni sebagai berikut;

- 1) Pengendalian efek/ dampak dari lingkungan
- 2) Pembangunan sebuah bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah, di atas dan/ atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/ sarana umum
- 3) Keselamatan bangunan Gedung
- 4) Kesehatan bangunan Gedung
- 5) Kenyamanan bangunan Gedung
- 6) Kemudahan bangunan Gedung

B. Jalan Lingkungan

Aspek kekumuhan dapat diamati melalui jalan lingkungan, yang meliputi sebuah jalan lingkungan yang tidak dapat memfasilitasi seluruh lingkungan perumahan atau permukiman serta mutu permukiman jalan lingkungan yang buruk.

C. Penyediaan Air Minum/ Air Layak Pakai

Aspek dari kekumuhan yang ditinjau melalui penyediaan air minum/air layak pakai antara lain:

- a. Tersedianya sebuah akses yang baik serta aman bagi air minum/air layak pakai, dimana masyarakat tidak dapat memperoleh akses air minum/ air layak pakai yang sesuai dengan syarat kebersihan dan kesehatan.
- b. Kebutuhan terkait air minum/air layak pakai setiap orang, yang mana kebutuhan air minum/air layak pakai pada suatu lingkungan perumahan atau permukiman paling sedikit tidak sampai 60 liter/orang/hari.

D. Drainase Lingkungan

Aspek- aspek kekumuhan dilihat melalui drainase lingkungan meliputi :

- a. Tidak mampuan drainase lingkungan dalam menyalurkan genangan air hujan yang berdampak pada terjadinya banjir dengan tinggi yang melebihi 30 cm dalam kurun waktu 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun.
- b. Tidak terdapat suatu saluran drainase secara tersier dan/ atau saluran lokal.
- c. Sistem drainase lokal dan drainase perkotaan tidak terhubung satu sama lain, sehingga berdampak air tersumbat atau tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan maupun banjir.
- d. Drainase yang tidak dipelihara secara rutin maupun berkala sehingga berakibat terhadap penimbunan limbah padat serta cair.
- e. Buruknya kualitas konstruksi drainase lingkungan, seperti drainase yang hanya berbentuk galian tanah tanpa adanya material

sebagai penutup atau pelapis meskipun terdapat kerusakan.

E. Pengelolaan Air Limbah

Aspek- aspek kekumuhan yang dilihat dari pengelolaan air limbah yaitu:

- a. Sistem pengelolaan air limbah yang buruk atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni tidak terdapat sistem pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman yang memadai, seperti dilengkapi dengan kloset yang telah terhubung dengan *septic tank* baik secara individual maupun komunal dan tersentralisasi.
- b. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah dan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan akibat kloset leher angsa yang tidak terhubung dengan *septic tank* juga tidak tersedianya pengolahan limbah di sekitar maupun terpusat.

F. Pengelolaan Persampahan

Aspek kekumuhan dari pengelolaan sampah ditinjau dari beberapa, antara lain;

Tidak sesuai sarana dan prasarana persampahan dengan standar syarat persampahan pada lingkungan permukiman dan perumahan dan tidak memadai, sebagai berikut;

- 1) Tempat sampah yang dilengkapi dengan sistem pemilahan sampah dalam skala domestik maupun rumah tangga.
- 2) TPS (Tempat Pengumpulan Sampah) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam skala lingkungan.
- 3) gerobak sampah dan/atau truk sampah dalam skala lingkungan.
- 4) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dalam skala lingkungan.
 - a. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi standar dimana pengelolaan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan berikut ini:
 - 1) pewadahan dan pemilahan domestik
 - 2) pengumpulan lingkungan
 - 3) pengangkutan lingkungan
 - 4) pengolahan lingkungan
 - b. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, sumber air bersih, tanah ataupun jaringan drainase sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase yang tidak dipelihara dengan baik, berkala maupun rutin.

G. Proteksi Kebakaran

Aspek kekumuhan dari proteksi kebakaran ditinjau melalui:

- a. Tidak tersedianya sarana serta prasarana terkait pencegahan kebakaran, antara lain;
 - 1) Sumber air atau pasokan air yang didapat melalui sumber alam maupun buatan
 - 2) Jalan lingkungan dengan lebar yang sesuai dengan standar yang memudahkan aksesibilitas kendaraan pemadam kebakaran
 - 3) Alat atau sarana komunikasi yang digunakan sebagai pemberitahuan terjadinya kebakaran
 - 4) Informasi atau data terkait sistem proteksi kebakaran lingkungan yang dapat diakses dengan mudah.
- b. Ketidakterediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran sebagai berikut;
 - 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2) Kendaraan pemadam kebakaran
 - 3) Mobil tangga sesuai kebutuhan
 - 4) Peralatan pendukung lainnya.

Data-data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis untuk kemudian dilakukan skoring pada kriteria indikator yang telah dianalisis. Pemberian skor/penilaian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

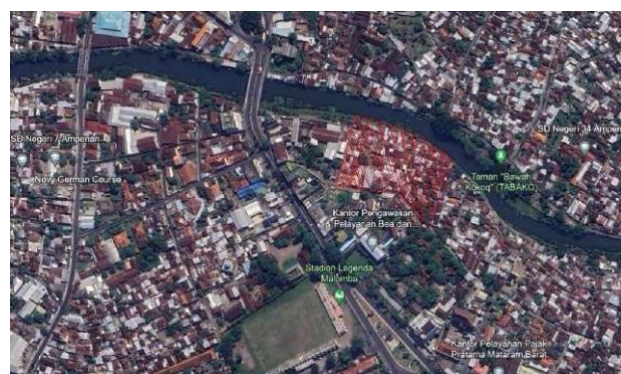
Tabel 1 Kriteria Skor

No.	Penilaian Kualitas	Rentang	Skor
1	Baik	0%-25%	0
2	Cukup	26%-50%	1
3	Buruk	51%-75%	3
4	Buruk Sekali	76%-100%	5

Adapun batasan penelitian pada penelitian ini yakni hanya mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di RT 08 Kawasan Permukiman Bantaran Sungai Jangkok.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil studi kasus di RT 08 permukiman bantaran sungai kelurahan Banjar, yang tepatnya terletak di seberang Sungai Jangkok, Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan yang berada di ujung barat wilayah Kota Mataram.



Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan survey yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

A. Bangunan Gedung

Keadaan bangunan Gedung pada permukiman menunjukkan bahwa sebagian besar bangunannya tidak sesuai dengan peraturan tata ruang yang ada terutama terkait kepadatan penduduk pada area permukiman tersebut yang tergolong tinggi. Terlebih lagi kualitas bangunan pada permukiman tersebut dapat dikatakan kurang baik.



Gambar 3 Rumah pada Permukiman Bantaran Sungai Jangkok



Gambar 4 Rumah pada Permukiman Bantaran Sungai Jangkok

Persebaran bangunan yang sebagian besar tidak menunjukkan kesesuaian dengan tata ruang serta tidak memiliki kualitas bangunan yang layak huni dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5 Peta Bangunan yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dengan bangunan gedung, dimana pada penataannya tidak memiliki mutu bangunan layak huni pada Permukiman Bantaran Sungai Jangkok

Keterangan :

1. Warna kuning menunjukkan persebaran rumah tidak kumuh pada permukiman rt 08 Kawasan permukiman bantaran sungai jangkok.
2. Warna coklat menunjukkan persebaran rumah kumuh rt 08 Kawasan permukiman bantaran sungai jangkok.

B. Jalan Lingkungan

Sudah terdapat jalan lingkungan pada kawasan permukiman tetapi belum melayani seluruh kawasan permukiman karena jalan. Adapun kualitas sebagian besar jalan lingkungan pada kawasan permukiman dapat dikategorikan cukup baik. Untuk pemaparan yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6 Peta Kondisi Jalan Lingkungan



Gambar 7 Kondisi Jalan Lingkungan

Keterangan:

1. Bagian pintu masuk menuju tapak merupakan jalan beraspal dengan kondisi yang baik.
2. Bagian pinggiran sungai merupakan jalan paving yang dicat dengan berbagai macam warna dengan kondisi yang cukup baik.
3. Bagian dalam permukiman merupakan jalan yang terbuat dari batu sikat yang dibuat bermotif dengan kondisi yang sangat baik
4. Bagian dalam permukiman juga terdapat jalan yang terbuat dari beton rabat dengan kondisi yang kurang baik.
5. Beberapa bagian dalam permukiman juga terhubung melalui jalan yang terbuat dari beton rabat dengan kondisi yang buruk

C. Penyediaan Air Minum

Masyarakat sebagian besar mendapat sarana atau akses terhadap penyediaan air minum yang cukup baik serta aman dimana masyarakat mendapat lebih dari 60 liter/orang/hari. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat memakai air yang berasal dari PDAM dan sumur bor. Untuk pemaparan lebih jelas terkait penyediaan air minum pada permukiman rt 08 kawasan bantaran sungai jangkok dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8 Peta Identifikasi Permukiman Warga berdasarkan Air Minum

Keterangan:

1. Untuk rumah/ permukiman masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai kebanyakan mendapatkan sumber air bersih dari PDAM dan tower air.
2. Untuk area yang berada lebih dalam, rumah/ permukiman masyarakat mendapatkan sumber air bersih dari sumur bor yang terdapat di setiap rumah dan terdapat juga beberapa rumah yang menggunakan sumber air bersih dari PDAM.



Gambar 9 Pipa PDAM dan Tower Air

D. Drainase Lingkungan

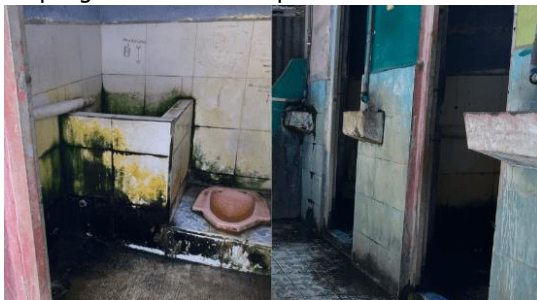
Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak terdapatnya drainase, hal ini menyebabkan masyarakat yang bermukim/berhuni di sekitar bantaran sungai kebanyakan membuang limbahnya langsung ke sungai.



Gambar 10 Sungai sebagai Tempat Pembuangan Limbah

E. Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah pada lokasi menunjukkan ketidak sesuaiannya dengan persyaratan teknis. Karena Sebagian besar warga masih membuang limbah langsung ke sungai. Adapun, untuk area rumah warga yang berada lebih dalam, beberapa rumah warga telah dilengkapi dengan toilet yang membuang limbahnya menuju ke septictank communal yang terdapat di beberapa titik dengan sistem pengolahan limbah terpusat.



Gambar 11 Toilet Komunal yang berada pada Permukiman

Untuk pemaparan lebih jelas mengenai pengolahan air limbah pada pada permukiman rt 08 kawasan bantaran sungai jangkok dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 12 Peta Identifikasi Permukiman Warga berdasarkan Air Minum

Keterangan:

1. Untuk rumah/ permukiman masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai kebanyakan membuang limbahnya langsung ke sungai.
2. Area rumah warga yang berada lebih dalam, rumah warga membuang limbahnya menuju ke septic tank communal yang ada di beberapa titik

F. Pengelolaan Persampahan

Limbah sampah yang dihasilkan oleh pemakaian rumah tangga akan diangkut oleh petugas kebersihan setiap harinya secara teratur yang kemudian limbah rumah tangga tersebut akan dikumpulkan pada satu tempat pembuangan untuk dipilah kembali. Lingkungan sekitar permukiman terbilang cukup bersih dari sampah rumah tangga dikarenakan adanya pengangkutan rutin tersebut.



Gambar 13 Peta Identifikasi Permukiman Warga berdasarkan Air Minum

G. Proteksi Kebakaran

Tidak tersedianya sistem proteksi kebakaran berupa, hydrant, apar, jalur evakuasi, maupun ruang terbuka sebagai titik kumpul. Hal ini dikarenakan posisi rumah warga yang dapat dikatakan padat.

Analisis

Berdasarkan survey dan pengolahan data, penulis melakukan penilaian atau skoring terhadap kriteria indikator pada penialaian aspek permasalahan. Selanjutnya, penulis memberikan total penilaian dari data yang dihasilkan untuk mengetahui tingkat atau klasifikasi kekumuhan serta untuk mengetahui permasalahan- permasalahan yang terdapat pada kawasan permukiman/ lokasi terkait. Perhitungan nilai dilakukan berdasarkan kriteria pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Permukiman

NO	PARAMETER	NILAI
1	76% - 100% area pada kawasan tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan ketentuan	5
2	51 % - 75% area pada kawasan tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan ketentuan	3
3	26% - 50 % area pada kawasan tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan ketentuan	1

Pada Tabel 2 mengenai klasifikasi tingkat pemukiman, bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018. Area yang mencakup sekitar 76 %- 100 % pada kawasan apabila tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan ketentuan akan diberi skor 5. Kemudian, area yang mencakup sekitar 51%-75% pada kawasan apabila tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan ketentuan akan diberi skor 3. Dan yang terakhir, area yang mencakup sekitar 26% - 50% pada kawasan apabila tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan ketentuan akan diberi skor 1. Tabel ini berfungsi sebagai acuan terhadap perhitungan kawasan kumuh, nantinya total skor/ hasil jumlah setiap indikator akan menghasilkan kesimpulan seperti yang ada pada Tabel 3

Tabel 3 Analisis Perhitungan Tingkat Kekumuhan

NO	SKOR/ NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN
1	76-100	Kumuh Berat
2	51-75	Kumuh Sedang
3	26-50	Kumuh Ringan

Tabel 3 merupakan acuan dari hasil skoring tiap indikator kekumuhan, Tabel ini berfungsi untuk menentukan tingkat kekumuhan yang ada pada permukiman RT 08 Kelurahan Banjar, sedangkan Tabel 4 menunjukkan nilai total skoring Kawasan permukiman RT 08 Kelurahan Banjar.

Tabel 4 Skoring/Penilaian Tingkat Kekumuhan di RT 08 Kelurahan Banjar

KRITERIA	SUB KRITERIA	NILAI					BOBOT
		1	2	3	4	5	
Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan			√			13
	Tingkat Kepadatan Bangunan				√		
	Kualitas Bangunan			√			
Jalan Lingkungan	Jaringan Jalan Tidak Melayani				√		8
	Kualitas Permukaan			√			

KRITERIA	SUB KRITERIA	NILAI					BOBOT
		1	2	3	4	5	
Penyediaan Air Minum	Jalan Tidak Dapat Mengakses Air Minum		√				3
	Kebutuhan Secara Individu Tidak Terpenuhi	√					
	Tidak Tersedia					√	
Drainase Lingkungan	Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan					√	15
	Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan					√	
	Sistem Pengelolaan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis				√		
Pengelolaan Air Limbah	Prasarana Dan Sarana Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis			√			7
	Prasarana Dan Sarana Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis		√				
	Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis			√			
Proteksi Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia					√	10
	Sarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia					√	
	TOTAL						

Tabel 5 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan berdasarkan Nilai Total Hasil Skoring/Penilaian

NILAI TOTAL	SKOR	TINGKAT KEKUMUHAN
-	76- 100	Kumuh Berat
61	51-75	Kumuh Sedang
-	26-50	Kumuh Ringan

Tabel 5 menunjukkan bahwa kawasan permukiman RT 08 Kelurahan Banjar berada pada tingkat kumuh sedang.

Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi dan analisis perhitungan sesuai dengan indikator permukiman kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018. Permukiman kelurahan Banjar RT 08 yang berada di bantaran sungai Jangkok termasuk dalam kategori kumuh sedang, ditinjau dari beberapa indikator antara lain; bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Oleh karena itu, permukiman ini sangat butuh penataan sisi dan ruang yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar ruang agar, setiap area dan pembagian zonasi dapat dimanfaatkan dengan baik juga perlunya dukungan serta partisipasi dari pemerintahan yang bekerja sama dengan warga setempat mampu meningkatkan kolaborasi serta perekonomian dari permukiman karena lokasi permukiman yang cukup vital serta terletak di pusat kota Mataram. Penataan dengan mengedepankan efektifitas penggunaan lahan sehingga rumah yang saling berdempetan bisa dijadikan bersusun keatas dengan setiap tingkatan dari rumah tersebut bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga mampu mawadahi kebutuhan hidup ataupun membantu keberlangsungan kehidupan dari warga yang ada dipermukiman tersebut.

Daftar Pustaka

- A Rahadiati et al. (2021). *The Impact of Flooding on Settlement Along the Jangkok River Mataram, Indonesia*. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 750 012003
- Anonim. Sungai Jangkok. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sungai_Jangkok
- Anonim. (2020). Kriteria, Indikator, dan Klasifikasi Penentuan Kategori Kumuh. <https://perkim.id/kawasan-kumuh/kriteria-indikator-dan-klasifikasi-penentuan-kategori-kumuh/>
- Haryono, I., Soesilo, T. E. B., & Agustina, H. (2024). Pengaruh Perilaku dan Kondisi Permukiman Masyarakat Terhadap Kualitas Air di Sungai Jangkok, Kota Mataram. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(1),73-83. <https://doi.org/10.14710/jkli.23.1.73-83>
- Istikasari, May, and Parfi Khadiyanto. (2014). "Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi." *Ruang: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 2, no. 4, 2014, pp. 301-310.
- Kamus Tata Ruang. (1997). Penerbit Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
- Koestoer, R. H. (1997). *Perspektif Lingkungan Desa Kota Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press
- Kurniasih, S. 2007. *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan*. Jakarta : Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur
- Nurfansyah. (2008). *Settlement Pattern Model at Riverside*. *Info Teknik*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2008. INFO – TEKNIK. 9 (2): 161 – 173.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Sari, Agistya Risna, & Ridlo, Mohammad Agung. (2021). Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*. Vol. 1, No. 2. <http://dx.doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>

Sinulingga, Budi, D. (2005). *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan – Jakarta

Sukmaniar., Kurniawan, A., & Pitoyo, A. J. 2020c. Population characteristics and distribution patterns of slum areas in Palembang City: Getis ord gi* analysis. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 200, p. 04005). EDP Sciences.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permuki

